

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TIM FORUM KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN PANGKEP

Nur Qalbi Talib<sup>1</sup>, Sri Rahayu Suparman<sup>2</sup>, Putri Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Administrasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatima Parepare  
Email: nurqalbialib1512@gmail.com

### ABSTRAK

Kebijakan Kabupaten Kota Sehat secara resmi dan sistematis efektif sejak terbitnya Peraturan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2005. Implementasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep dimulai sejak tahun 2007. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Tim Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan penelitian berjumlah 8 informan. 4 diantaranya merupakan informan kunci dan 4 informan biasa. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan baik dalam lingkup tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat namun masih perlu dimaksimalkan agar sampai kepada masyarakat dan dari segi sumber daya, staf (tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat) sudah terpenuhi namun tingkat partisipasi sudah berkurang dan beberapa staf mempunyai beban kerja berlebih, untuk sarana dan prasarana sudah mendukung dengan adanya kantor sekretariat, dan keterbatasan anggaran pada OPD dalam pencapaian indikator kabupaten sehat dan dana insentif bagi tim. Implementasi kebijakan kabupaten sehat di kabupaten pangkep sejauh ini sudah dilakukan dengan baik dari segi komunikasi dan sumberdaya. Tersedianya sumberdaya manusia dalam tim forum yang dinilai memiliki power untuk mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan kabupaten sehat. Namun pelaksanaan sosialisasi kabupaten sehat di tingkat tim forum kecamatan dan desa masih kurang dikarenakan kabupaten pangkep memiliki wilayah yang sangat luas sehingga harus menggunakan dana yang besar sementara dana yang tersedia untuk kabupaten sehat sangat terbatas.

Kata kunci : implementasi, kebijakan kabupaten sehat, kabupaten pangkep

### ABSTRACT

*The Healthy City Regency Policy has been officially and systematically effective since the publication of a Joint Regulation between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Health in 2005. Implementation of the Healthy Regency Policy in Pangkep Regency began in 2007. The aim of this research is to analyze the implementation of the Healthy Regency Forum Team policy in Pangkep Regency. This research is a qualitative research. Data collection techniques used in-depth interviews and document review. There were 8 research informants. 4 of them were key informants and 4 were regular informants. Data analysis uses content analysis. The results of the research show that communication has been carried out well within the scope of the supervisory team and the healthy district forum team but still needs to be maximized so that it reaches the community and in terms of resources, staff (the supervisory team and healthy district forum team) have been fulfilled but the level of participation has decreased and some staff have excessive workloads, facilities and infrastructure are already supported by the existence of a secretariat office, and budget limitations for OPD in achieving healthy district indicators and incentive funds for teams. The implementation of the healthy district policy in Pangkep district has so far been carried out well in terms of communication and resources. The availability of human resources in the forum team which is considered to have the*

*power to influence the community in implementing healthy habits. However, the implementation of socialization on healthy districts at the sub-district and village forum team level is still lacking because Pangkep district has a very large area so it has to use large amounts of funds while the funds available for healthy districts are very limited.*

*Keywords: implementation, healthy district policy, Pangkep district*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia sudah lama dilakukan namun secara resmi dan sistematis efektif sejak terbitnya Peraturan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2005. Regulasi mengenai penyelenggaraan kota sehat di Indonesia diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 pada tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. (Kemenkes RI, 2021)

World Health Organization (WHO) pada tahun 1980-an memperkenalkan sebuah konsep yang dianggap sebagai pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat. Konsep tersebut adalah Healthy City atau Kota Sehat (Palutturi, 2017)

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2021 bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 Kabupaten/Kota telah secara penuh menyelenggarakan program Kabupaten/Kota sehat atau sebesar 100% (Kemenkes RI, 2021). Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang sejauh ini telah melaksanakan program tersebut sejak tahun 2007 dan telah terbentuk forum kabupaten sehat yang berfungsi sebagai Lembaga yang memfasilitasi terwujudnya program kabupaten sehat (Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, 2021).

Pada tahun 2021 kabupaten Pangkep absen dalam verifikasi penilaian kabupaten kota sehat. Berdasar-

kan penelitian terdahulu tentang gambaran kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat pada lima kota Indonesia yaitu Kota Medan, Denpasar, Kota Manado, Balikpapan dan Manado oleh Dwi Hapsari bahwa permasalahan utama adalah kurangnya sosialisasi tentang kota sehat dan partisipasi birokrasi yang secara berlebihan sehingga forum kota sehat tidak mempunyai inovasi tersendiri. Kebijakan yang selalu berganti-ganti juga menjadi faktor penghambat terbentuknya kota sehat di beberapa daerah tersebut (Hapsari, 2007) pelaksanaan suatu kebijakan belum terlaksana secara optimal dikarenakan oleh karena beberapa aspek salah satunya komunikasi dan sumber daya dimana faktor-faktor tersebut dapat menjadi penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Dengan demikian dilakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Pangkep.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen.

### **B. Informan Penelitian**

Pemilihan Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 8 orang, terdiri dari 4 orang informan kunci dan 4 orang informan biasa. Dalam pemilihan informan penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling).

**C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan telaah dokumen. Data di analisis dengan menggunakan analisis isi (Content Analysis).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**1. Karakteristik Informan**

Karakteristik Informan dapat dilihat pada Tabel 1. Informan penelitian adalah tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep.

Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan koordinasi antara lintas sektor yang melibatkan se-

mua stakeholder mulai dari tingkat teratas sampai tingkat paling bawah. Pertemuan internal tim pembina dan OPD terkait, dan pertemuan rutin tim forum kabupaten sehat. Selain itu tim forum melakukan bimtek atau sosialisai di tingkat kecamatan dan kelurahan/Desa. Berikut pernyataan dari beberapa Informan:

“Kami selaku tim Pembina mengadakan pertemuan rutin lintas sektor, pemerintah maupun swasta yang nantinya terlibat dalam implementasi KKS ini, kita juga mengadakan pertemuan dengan tim forum di sekretariat, kemudian tim forum mengadakan kegiatan dengan tim kecamatan kelurahan dan desa seperti bimtek, kalau tahun ini mungkin sudah ada 2 atau 3 kali pertemuan kalau untuk tim secara keseluruhan ya yang dihadiri juga sama Bupati kita selalu memperkuat Kerjasama kita dengan mengadakan pertemuan atau rapat”

(HM, 49)

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian Tim Pembina Kabupaten Sehat

Kode Informan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Unit Kerja	Status
IT	42	L	Bappelitbangda	Informan Kunci
MN	49	L	Bappelitbangda	Informan Kunci
HM	49	L	Dinas Kesehatan	Informan Kunci
IHW	48	P	Dinas Kesehatan	Informan Kunci

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian Tim Forum Kabupaten Sehat

Kode Informan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Jabatan	Status
AAM	64	L	Tim Forum	Informan Biasa
HEH	64	P	Tim Forum	Informan Biasa
MIS	58	L	Tim Forum	Informan Biasa
MWR	48	P	Tim Forum	Informan Biasa

“Tim forum itu dominan itu di kecamatan, melakukan sosialisasi kabupaten sehat dan bimtek kelengkapan dokumen kabupaten sehat di tingkat kecamatan yaitu forum komunikasi dan satgas di tingkat kelurahan/

desa”  
(AAM, 64)

“Informasi mengenai kabupaten sehat sudah dilakukan dan diberi penjelasan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat, namun untuk sosialisasi untuk seluruh kecamatan belum dilakukan mengingat kondisi wilayah kabupaten pangkep sangat luas” (MWR,48 )

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan program kabupaten sehat tidak terlepas dengan adanya staf pelaksana pada kegiatan kabupaten sehat staf pelaksana pada kegiatan kabupaten sehat di tingkat kabupaten adalah tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat, Forum komunikasi (Forkom) Kecamatan dan Satgas di tingkat Kelurahan/Desa. Ketersediaan fasilitas Kantor sekretariat untuk tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat sebagai sarana pendukung. Anggaran untuk kegiatan kabupaten sehat itu dari APBD, pihak swasta dan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Namun biaya operasional kegiatan kabupaten sehat dianggap masih terbatas dan tidak adanya insentif yang diterima oleh masing-masing tim. Berikut pernyataan beberapa informan:

“OPD dalam hal ini otomatis terbentuk sebagai tim pembina. Dan untuk tim forum adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan yang berada di forum untuk tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan melalui SK pembentukan tim forum oleh Bupati. Semua yang terlibat pada kabupaten sehat ini tentunya adalah orang-orang berkompetensi untuk kita bisa mencapai tujuan KKS itu sendiri” (MN,49)

“Fasilitas untuk kantor sekretariat kita sudah ada baik untuk sekretariat di tim pembina yang berada

di ruang mitra Bappelitbangda dan kantor sekretariat khusus di tim Forum kabupaten sehat”(IT,42)

“Anggaran kabupaten sehat sudah cukup besar dari APBD untuk biaya operasional kegiatan kabupaten sehat dan untuk program di tiap OPD mereka punya anggaran sendiri” (IHW,48)

“Biaya operasional ada namun masih terbatas mengingat kegiatan kabupaten sehat untuk sosialisasi dan menjangkau wilayah kabupaten pangkep yang sangat luas ini belum cukup dan juga perlu memperhatikan insentif untuk tim forum mengingat tidak ada gaji bulanan yang diterima selama ini” (AAM, 64)

## B. Pembahasan

### 1. Komunikasi

Berdasarkan teori Edward III komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak memberikan pemahaman tujuan dari sasaran kebijakan tidak akan sampai oleh kelompok sasaran dan kemungkinan terjadi penolakan dari sasaran kelompok tersebut. Proses transmisi pada komunikasi implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten pangkep masih menemui kendala dimana tim Pembina sebagai implementor belum bisa memberikan informasi secara terstruktur dan jelas sehingga para pelaksana kebijakan (tim forum kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa) masih menilai informasi yang diterima kurang sehingga memerlukan evaluasi dan monitoring implementasi penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten pangkep. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Sagala, 2016) bahwa Proses pemberian informasi lewat komunikasi setelah memperhatikan aspek implementasi juga diperlukan aspek monitoring dan evaluasi yang merupakan satu kesatuan salah satunya dengan pengukuran dampak komunikasi terhadap masyarakat (jangka panjang, menengah dan pendek).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam implementasi kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep sudah dilaksanakan dimana tim pembina dan tim forum selalu mengadakan koordinasi atau pertemuan rutin baik itu dilingkungan pemerintahan ataupun melibatkan tim forum kabupaten, kecamatan hingga kelurahan/desa. Namun komunikasi antara tim Pembina dan tim forum terkendala dalam hal penerimaan informasi dan pemahaman tugas dan tanggungjawab setiap instansi sesuai SK Bupati yang telah ditetapkan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan maka implementasi tentu tidak akan efektif sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah staf pelaksana pada kegiatan kabupaten sehat di tingkat kabupaten adalah tim Pembina dan tim forum kabupaten sehat, Forum Komunikasi (Forkom) Kecamatan dan Satgas di tingkat Kelurahan/Desa.

Untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten pangkep dibutuhkan ketersediaan anggaran dari pemerintah yakni penganggaran APBD, penganggaran dinas atau instansi terkait, Lembaga, swasta dan paertisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian semua informan mengatakan bahwa anggaran kabupaten kota sehat itu dari APBD, Lembaga swasta dan masyarakat. Salah satu informan mengatakan bahwa anggaran kabupaten sehat tidak memasukkan insentif bagi tim forum dan hanya sebatas biaya operasional untuk mendukung kegiatan seperti sosialisasi atau pertemuan, dan perjalanan dinas bagi tim forum jika berkegiatan di beberapa kecamatan seperti pertemuan bimtek kepada tim forum tingkat kecamatan

dan kelurahan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Irmina, 2022) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala dalam mengimplemntasikan kebijakan adalah kurangnya sumberdaya (anggaran) yang diperlukan. Dengan demikian bahwa ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep dianggap cukup untuk biaya operasional, namun sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Pangkep memikirkan terkait anggaran dana / insentif untuk masing-masing tim yang terlibat pada kegiatan kabupaten sehat.

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk sekretariat tim Pembina ada di kantor Bappeda. Penempatan sekretariat tim Pembina ini sudah tepat maka OPD yang terlibat sebagai tim Pembina dapat lebih maksimal dalam tugas penyelenggaraan tugas dan fungsinya mengingat penyelenggaraan kabupaten sehat ini merupakan tugas lintas sektor. Kemudian untuk sekretariat tim forum kabupaten sehat juga sudah ada dan untuk tim forum kecamatan atau forkom berada di masing- masing kecamatan. Peranan sekretariat sangat besar karena merupakan tempat atau wadah bagi tim melakukan aktivitas dalam rangka menyusun program kerja, membahas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Phasky, 2013) menyatakan bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung tanah dan peralatan per Kantor akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program. Dengan demikian, dengan ketersediaan fasilitas seperti sekretariat tim forum yang lengkap akan menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Pangkep bahwa Komunikasi sudah dilakukan dengan baik namun dalam pelaksanaan sosialisasi antar OPD masih memiliki ego sektoral. dan sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup namun tingkat keaktifan tim sudah berkurang dan untuk sarana prasana sudah mendukung dengan adanya kantor sekretariat. Faktor pendukung penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten pangkep antara lain adanya pedoman umum, dukungan dana dari pemerintah dan pihak swasta, ketersediaan fasilitas kantor sekretariat dan sumberdaya manusia di dalam tim forum yang dinilai memiliki power untuk mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat. Faktor penghambat penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten pangkep antara lain pelaksanaan sosialisasi kabupaten sehat pada tingkat kecamatan dan keluraha/desa belum dilaksanakan secara menyeluruh. sulitnya untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat terutama dalam hal kepemilikan jamban keluarga yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah kabupaten Pangkep dalam menangani masalah ODF.

### B. Saran

Diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten pangkep untuk memasukkan program kabupaten sehat sebagai program utama yang sejalan dengan visi dan misi Bupati. Program kota sehat tidak hanya merupakan pekerjaan bagi Bappelitbangda dan Dinas Kesehatan melainkan merupakan pekerjaan bersama seluruh OPD yang terkait dengan tatanan kabupaten kota sehat untuk itu diharapkan saling bekerjasama dengan dinas lain supaya semua merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan kabupaten sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Kabupaten Pangkep (2021) "Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Angka 2021."
- BPS Provinsi Sulsel (2021) "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka2021."
- BPS, RI. (2021) "Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurutProvinsi, 2010-2035."https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035.html.
- Dinas Kesehatan Kab.Pangkep (2019) "Profil Kesehatan Kab. Pangkep Tahun 2019," hal. 1–69.
- Edward George (1980). "Implementing Public Policy". Amerika Serikat: Hopkins University.
- Grindle, M. S. (1980). "Politics and Policy Implementation in The Thrid World". Princnton: University Press, New Jersey.
- Inayah, Nurfitri. (2019). Impact Evaluation of Healthy city Implementation in Makassar City.Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020 Aug 25; 8(T2):12-15.https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5175
- Irmina, Adi Ringrih (2022). Implementation of Public Health Center Accreditation Policy in Makassar city.International Journal of Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN; 1308-5581 Vol14, Issue 03 2022.doi:10.9756/INT-JESCE/V14I3.41
- Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan RI. (2005). Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Jakarta, Indonesia.
- Maleong, L. . (2012). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Rosda Karya.
- Palutturi, S. (2017) Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi lokal untuk Indonesia. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Meneteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor :1138/MENKES/PB/VIII/2005
- Phaksy, N., Hadi, M. dan Rengu, S. P. (2004). “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM). Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar”. (40) hal. 1195 –1202.
- Soedirham, O. (2012). Kota Sehat sebagai Bentuk Sustainable Communities Best Practice. *Kesmas: National Public Health Journal*, 7(2), 51-55.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.